



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2022-2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

## BAB II

### RAD-PG

#### Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai optimalisasi potensi daerah dalam sektor Pangan dan Gizi, peningkatan aksesibilitas Pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan Pangan, penguatan kelembagaan Pangan serta meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2024.

#### Pasal 3

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan Pangan dan Gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
  - b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemangku kepentingan di daerah dalam meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi keluarga; dan
  - c. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua tujuan pembangunan berkelanjutan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pembangunan Pangan dan Gizi.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pangan dan Gizi di Daerah, yang mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga organisasi non pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berperan untuk:
  - a. mendorong keikutsertaan masyarakat dan lembaga organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan Pangan dan Gizi; dan
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Pangan dan Gizi.

#### Pasal 4

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : ANALISIS SITUASI
  - c. BAB III : RENCANA AKSI MULTISEKTOR

- d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI
  - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
  - f. BAB VI : PENUTUP
  - g. LAMPIRAN
- (2) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

#### Pasal 5

RAD-PG terdiri atas kebijakan di bidang:

- a. peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- c. peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi (esensial); dan
- d. penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:
- a. peningkatan produksi Pangan yang beragam;
  - b. penyediaan Pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - c. pengelolaan cadangan Pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
  - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*).
- (2) Kebijakan di bidang peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:
- a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga Pangan;
  - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
  - c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang Pangan;
  - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial Pangan dengan pemanfaatan jenis Pangan yang beragam;
  - e. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
  - f. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan Pangan dan terdampak bencana; dan
  - g. pengembangan sistem logistik Pangan.
- (3) Kebijakan di bidang peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi (esensial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:
- a. penguatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi dan pemantauan status Gizi;
  - b. pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;

- c. edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, BerGizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
  - d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
  - e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah Gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
  - f. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
  - g. peningkatan layanan kesehatan dan Gizi masyarakat; dan
  - h. pengendalian pemborosan Pangan (*food waste*).
- (4) Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:
- a. peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi di pusat dan daerah;
  - b. penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi di pusat dan daerah;
  - c. penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Pangan dan Gizi; dan
  - d. penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk Ketahanan Pangan dan Gizi.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) RAD-PG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Pelaksanaan RAD-PG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 19 Juni 2023  
BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 19 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN  
DAN GIZI KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2023–2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi yang diusung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, keberadaan Rencana Daerah Pangan dan Gizi menjadi penting posisinya terhadap visi dan misi tersebut. Adapun visinya yaitu : *“Pandeglang Berkah, Berdaya Saing dan Sejahtera”* dengan misi :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multi sektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK, perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi pada usia bayi dan balita mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular saat dewasa dan lansia, serta berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Pertumbuhan PDRB ADHK sering disebut sebagai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yaitu salah satu indikator yang dapat menunjukkan daya saing daerah. Perkembangan LPE wilayah dengan trend positif menunjukkan keberhasilan wilayah dalam pembangunan ekonomi. Meskipun dilihat dari angka PDRB ADHB Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan selama 5 tahun, namun dari segi pertumbuhannya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, LPE Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar 5,81% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 5,52%. LPE mengalami peningkatan menjadi 6,0% pada tahun 2017. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 LPE mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,03%, 2019 sebesar 4,75% dan tahun 2020 sebesar -0,54%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, yang menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian. Akan tetapi angka -0,54% ini adalah yang paling baik kondisinya dibandingkan 7 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Sumber daya ekonomi di Kabupaten Pandeglang dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan. Proses hilirisasi Sumber Daya Alam, terutama yang menjadi komoditas unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga, ekonomi Pandeglang relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam kemandirian pangan Kabupaten pandeglang.

Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan sosial inklusi yang menjadi peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur, teknologi dan industri, dsb. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten pandeglang secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen berisikan rekomendasi aksi yang diacu untuk pembangunan pangan dan gizi di daerah.



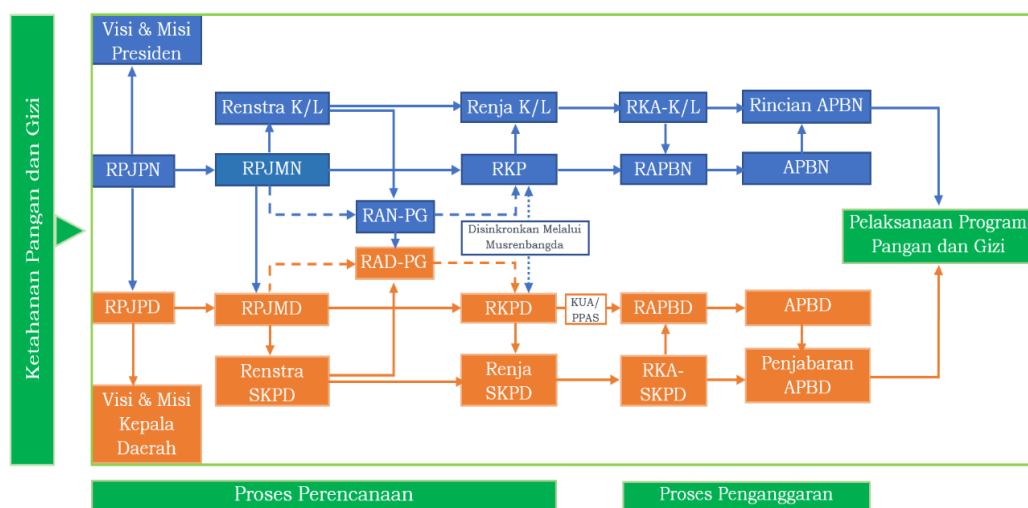
## 1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis, khususnya dalam aspek pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dalam menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RAD-PG:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026; dan
10. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi.

#### 1.4 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG 2022-2024 adalah:

- a. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor yang berpengaruh terhadap program prioritas seperti pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemangku kepentingan di daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga; dan
- c. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMD dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di kabupaten Pandeglang adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.

## BAB II

### ANALISIS SITUASI

#### 2.1. Capaian

##### A. Capaian Bidang Pangan

##### 1. Ketersediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pertanian merupakan kategori lapangan usaha yang memberikan share terbesar pada pendapatan regional Kabupaten Pandeglang. Pada Tahun 2020 *share*-nya mencapai 33,97 persen terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang. Sub kategori tanaman pangan sebagai penyumbang terbesar di sektor pertanian, walaupun sub kategori ini pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,03 persen. Di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang terkenal dengan beberapa komoditas unggulan, antara lain padi dan kedelai. Sehingga menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai sentra produksi padi. Pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan produksi yakni dari 419.229 ton pada tahun 2019 menjadi 449.206 ton di tahun 2020, sedangkan produksi ubi jalar meningkat 57,41 persen menjadi 8.848 ton di tahun 2020.

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 1 Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2018-2020

Komoditi Pangan	2018	2019	2020
Padi			
• Luas Panen (ha)	93.386	83.996	82.475
• Produksi (ton)	449.965	419.229	449.206
Jagung			
• Luas Panen (ha)	45.335	15.412	9.581
• Produksi (ton)	222.374	82.359	60.266
Kedelai			
• Luas Panen (ha)	18.925	1.281	451
• Produksi (ton)	14.115	845	703
Kacang Tanah			
• Luas Panen (ha)	256	238	373
• Produksi (ton)	334	291	447
Kacang Hijau			
• Luas Panen (ha)	224	845	206
• Produksi (ton)	179	645	280
Ubi Kayu			
• Luas Panen (ha)	1.160	1.092	1.107
• Produksi (ton)	29.928	25.200	24.627
Ubi Jalar			
• Luas Panen (ha)	460	400	482
• Produksi (ton)	6.420	5.621	8,484

#### Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari kawasan tanaman pangan berupa lahan baku sawah yang didalamnya terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 45.755 Ha, LP2B dan LCP2B, dan kawasan tanaman pangan berupa lahan kering untuk tanaman padi dan palawija. Dari 326 desa dan 13 Kelurahan di Kabupaten Pandeglang, 265 desa masuk dalam prioritas 1 (78,2%), 61 desa prioritas 2 (18%) dan, 10 desa prioritas 3 (2,9%). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cikeusik, Cigeulis, Panimbang, Sobang, Munjul, Angsana, Sindangresmi, Picung, Bojong, Saketi, Cisata, pagelaran, Patia, Sukaresmi, Labuan, Carita, Jiput, Cikedal, Menes, Pulosari, Mandalawangi, Cimanuk, Cipecang, Banjar, Kaduhejo, Mekarjaya, Pandeglang, Majasari, Cadasari, Karangtanjung dan Koroncong.

#### Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura di Kabupaten Pandeglang direncanakan dengan luas kurang lebih 16.330 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

#### Kawasan perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Pandeglang direncanakan dengan luas kurang lebih 67.106 Ha, yang tersebar di seluruh kecamatan.

#### Kawasan peternakan

Potensi pengembangan peternakan tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Pandeglang, Majasari, Cadasari, dan Labuan.

Sedangkan kawasan perikanan di Kabupaten Pandeglang terdiri atas kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan Pelabuhan perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

#### Kawasan perikanan tangkap

Kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Pandeglang direncanakan tersebar di perairan umum Pantai Barat dan Pantai Selatan meliputi Kecamatan Sumur, Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Carita, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Cimanggu.

#### Kawasan perikanan budidaya

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Pandeglang direncanakan tersebar di sekitar Pantai Barat dan Pantai Selatan dengan luas kurang lebih sebesar 552 Ha, yang tersebar di Kecamatan Sumur, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Labuan, dan kawasan perikanan budidaya lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.

#### Pelabuhan perikanan

Terdiri dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berupa PPP Labuan yang terletak di Kecamatan Labuan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi PPI Cikeusik, PPI Panimbang, PPI Sidamukti, PPI Sukanagara, PPI Sumur, dan PPI Tamanjaya.

Tabel 2. Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2020

Indikator Indeks Ketersediaan	Nilai	Kategori IKP (Prioritas)
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah	0,48	6

Sumber: FSVA 2021, Kementerian Pertanian

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai konsumsi normatif kabupaten pandeglang tahun 2020 adalah 0,48 artinya Kabupaten Pandeglang dalam kondisi surplus tinggi. Sedangkan kategori IKP nya berada pada prioritas 6 (sangat tahan).

## 2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 339 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pandeglang, maka didapatkan 1 desa (Prioritas 1), 19 desa (Prioritas 2), 68 desa (Prioritas 3), 210 desa (Prioritas 4), 36 desa (Prioritas 5) dan 5 desa (Prioritas 6). Sesuai dengan data table berikut ini:

Tabel 3 Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

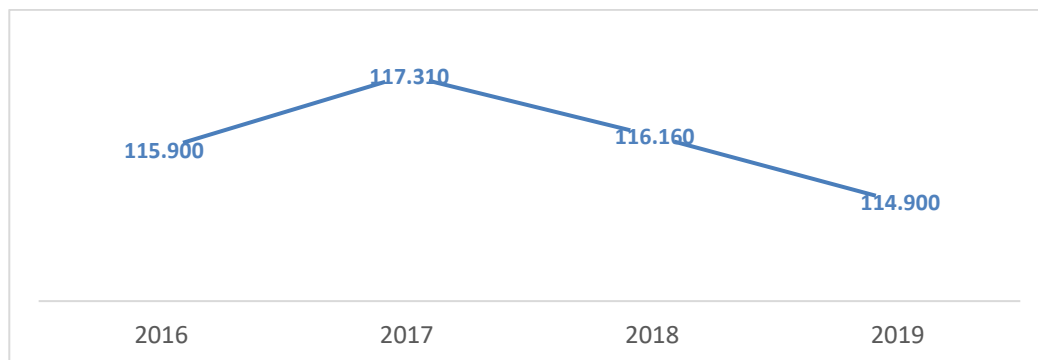
Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	1 Desa	0,29
2	19 Desa	5,60
3	68 Desa	20,05
4	210 Desa	61,95
5	36 Desa	10,62
6	5 Desa	1,47

Sumber: Laporan FSVA Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih ada beberapa desa yang mengindikasikan terjadinya kerawanan pangan, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kerawanan pangan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat mengurangi Rasio kemiskinan, adapun jumlah penduduk miskin atau rumah tangga Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2020 sebanyak 4289 rumah tangga.

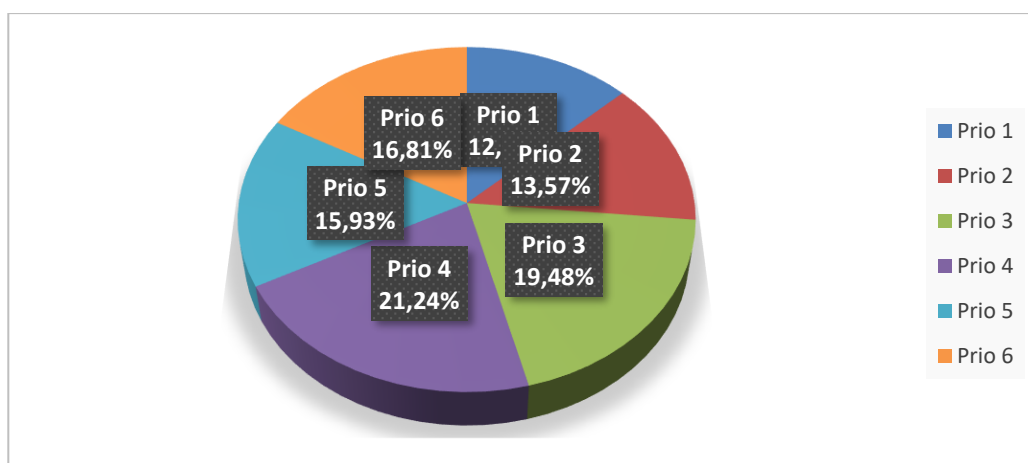
Pada tingkat desa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2018, terdapat 156 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 44 (Prioritas 1). Sebanyak 46 desa (13,56%) masuk prioritas 2, dan 66 desa (19,46%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 156 desa tersebut.

Gambar 2 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Pandeglang



Sumber: Laporan FSVA Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Gambar 3 Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah



Sumber: Laporan FSVA Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Tabel 4. Indeks Keterjangkauan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Indikator Indeks Keterjangkauan	Nilai	Kategori IKP (Prioritas)
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	9,92	6
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	38,90	5
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,0	6

Sumber: FSVA 2021, Kementerian Pertanian

Tabel 4 menunjukkan bahwa persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 adalah 9,92% atau kategori sangat baik. Sementara Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran berada di angka 38,90% atau kategori baik. Hal yang baik pula ditunjukkan pada akses rumah tangga terhadap listrik yang mencapai 0% atau semua penduduk di Kabupaten Pandeglang sudah mendapatkan akses terhadap listrik.

### 3. Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.

Berdasarkan indeks ketahanan pangan, aspek pemanfaatan pangan kabupaten pandeglang adalah yang paling rendah yaitu dengan nilai 54,71 di tahun 2020, sementara nilai pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan sudah cukup baik yaitu masing-masing 92,16 dan 79,53 (FSVA 2021, Kementerian Pertanian). Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita bersama bagaimana pangan yang tersedia ini bisa diakses adil dan merata oleh masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Lebih detil mengenai indeks keterjangkauan pangan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Indeks Pemanfaatan Pangan Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2020

Indikator Indeks Pemanfaatan Pangan	Nilai	Kategori IKP (Prioritas)
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	52,60	3
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	1,53	6
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	7,24	3
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	21,84*	2
Angka harapan hidup pada saat lahir	64,66	4

\*) angka yang tersedia pada tahun 2020 hanya angka Provinsi

Sumber: FSVA 2021, Kementerian Pertanian



Tabel 5 menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di Kabupaten Pandeglang adalah 52,60% atau lebih dari setengah penduduknya belum bisa mengakses air bersih, kondisi ini termasuk dalam kategori agak buruk. Angka yang cukup baik Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk adalah 1,53 % yang termasuk kategori sangat baik. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun adalah 7,24 % tahun yang termasuk kategori agak buruk. Sementara angka stunting yang mencapai 21,84% di provinsi termasuk dalam kategori kurang baik. Sementara itu, angka harapan hidup mencapai 64,66 % atau dalam kategori agak baik.

Indikator yang termasuk dalam kategori rentan dan rawan yang perlu mendapat perhatian adalah pada indikator akses air bersih, rata-rata lama sekolah perempuan dan balita stunting sehingga perlu mendapat perhatian yang serius.

#### 4. Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan rencana aksi menjadi penting karena menyangkut siapa dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada kerangka pelaksanaan diatur kerangka kelembagaan, manajemen keuangan dan aliran dana, anggaran indikatif, strategi pengembangan kapasitas, strategi advokasi dan komunikasi, serta strategi monitoring dan evaluasi. Berikut ini adalah susunan keanggotaan dan tugas forum pengarah dan teknis RAD PG Kabupaten Pandeglang tahun 2022-2024:

Susunan keanggotaan forum pengarah rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten pandeglang tahun 2022-2024:

PENANGGUNG JAWAB	:	Bupati Pandeglang
KETUA FORUM PENGARAH	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
SEKRETARIS	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
ANGGOTA	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang 5. Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
8. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

Susunan keanggotaan forum teknis rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten pandeglang tahun 2022-2024:

**KETUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang

**SEKRETARIS** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang  
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang

**POKJA KETERSEDIAAN**

**Koordinator** : Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**Anggota** : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang  
2. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang  
3. Kepala Bidang Pengelolaan, Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang  
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang  
5. Kepala Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang  
6. Fungsional Perencana Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang  
7. Pejabat Fungsional Administrasi Kesehatan Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

## POKJA KETERJANGKAUAN

- Koordinator : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
4. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
5. Kepala Bidang Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang
6. Fungsional Perencana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

## POKJA PEMANFAATAN

- Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang
3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang
4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang
7. Kepala Bidang Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Sani dan Statistik Kabupaten Pandeglang
8. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang
9. Fungsional Perencana Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang

## POKJA KELEMBAGAAN

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
3. Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pandeglang
5. Fungsional Analis Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Tugas Forum Pengarah yaitu:

### 1. Tugas Forum Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PD meliputi koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan kedalam RAD-PG serta Kegiatan Prioritas yang diperlukan;
- b. menyampaikan RAD-PG dari Bupati kepada Gubernur;
- c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

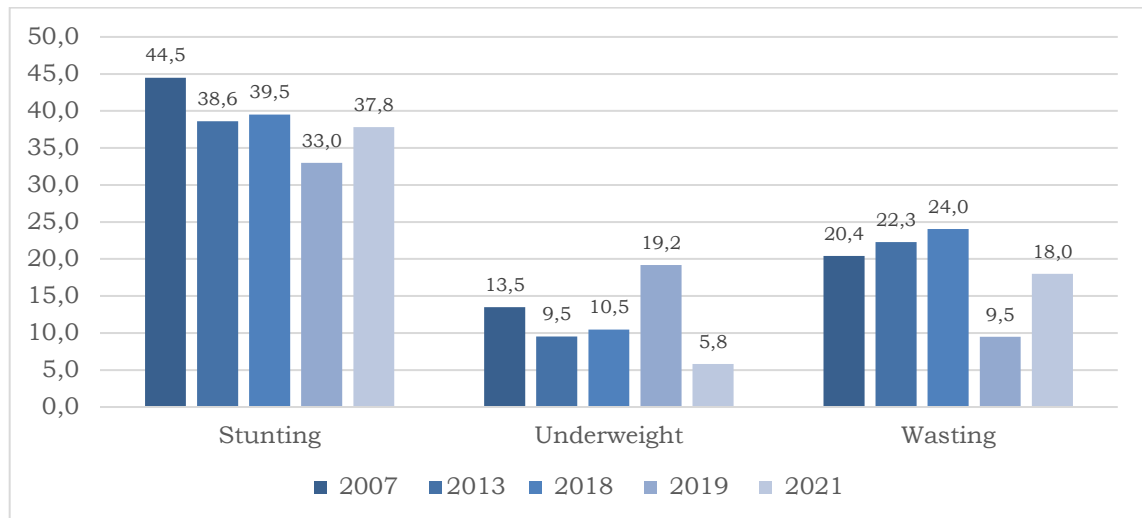
### 2. Tugas Forum Teknis:

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan RAD-PG;
- b. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. menyampaikan rancangan RAD-PG kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
- g. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

## B. Capaian Bidang Gizi

Pembangunan pangan masih dihadapi oleh permasalahan *triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Berikut adalah gambaran status gizi balita di kabupaten pandeglang.

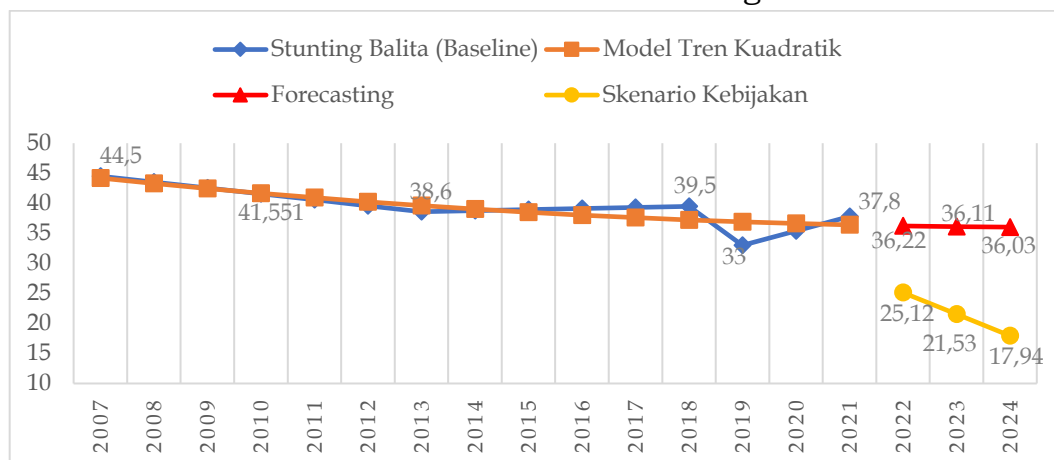
Gambar 4. Status Gizi Balita Kabupaten Pandeglang Tahun 2007-2020



Sumber: Riskesdas 2007, 2013, 2018; SSGBI 2019; SSGI 2020

Angka balita stunting di kabupaten pandeglang terlihat fluktuatif. Pada tahun 2007, prevalensinya mencapai 44,5% dan menurun di tahun 2013 menjadi 38,6% dan angkanya kembali naik menjadi 37,8% di Tahun 2021. Angka ini cukup menjadi perhatian karena berada diatas rata-rata nasional (24,2%) dan Provinsi Banten (24,5%). Begitu juga prevalensi wasting yang tampak meningkat dari 20,4% di tahun 2007 menjadi 24,0% di tahun 2018. Prevalensinya kemudian turun di tahun 2019 menjadi 9,5% dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 18,0%. Namun kondisi yang membaik pada status gizi underweight balita yang turun dari 19,2% pada tahun 2019 menjadi 5,8% ditahun 2021.

Gambar 5. Analisis Kecenderungan dan Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting



Untuk mengejar target RPJMN prevalensi stunting menjadi 14,0% di tahun 2024, Kabupaten pandeglang perlu berkontribusi terhadap penurunannya. Dari analisis tren yang dilakukan seperti yang tertera pada Gambar 5, terlihat bahwa jika mengikuti kecenderungan (*bussines as usual*), terlihat rata-rata penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang sangat lamban, yakni kurang dari 0,5% pertahun. Sehingga diperlukan

percepatan penurunan stunting di berbagai sektor. Dengan mempertimbangkan prevalensi dan jumlah balita stunting di Kabupaten Pandeglang, didapatkan rekomendasi penurunan stunting menjadi 25,12 % di tahun 2022, 21,53% di tahun 2023, dan 17,94% di tahun 2024. Diproyeksikan akan terdapat selisih gap 18,04 poin di tahun 2024 antara skenario kebijakan dan kecenderungan/forecasting jika tidak segera dioptimalkan pelaksanaan percepatan penurunannya.

Beberapa faktor determinan yang mempengaruhi status gizi balita di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator Pelayanan KIA yang mempengaruhi Status Gizi di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Bumil mendapat TTD minimal 90 buah selama kehamilan (%)	Kehadiran di Posyandu (%)	Imunisasi Dasar Lengkap (%)
1	Angsana	100	33,0	57,2
2	Banjar	100	23,0	N/A
3	Bojong	98,3	33,8	6,3
4	Cadasari	100	35,0	75,4
5	Carita	70,8	42,4	49,0
6	Cibaliung	100	38,2	75,8
7	Cibitung	100	38,8	N/A
8	Cigeulis	81	53,4	N/A
9	Cikedal	100	46,6	83,5
10	Cikeusik	100	38,6	N/A
11	Cimanggu	78,7	44,0	100
12	Cimanuk	81,5	36,3	47,6
13	Cipeucang	N/A	30,2	N/A
14	Cisata	89,4	42,9	90,5
15	Jiput	100	41,2	N/A
16	Kaduhejo	80,5	28,7	11,92
17	Karangtanjung	80,8	19,8	90,5
18	Karoncong	100	58,0	90
19	Labuan	94,2	46,9	57,3
20	Majasari	90,5	34,6	N/A
21	Mandalawangi	77,7	43,5	85,9
22	Mekarjaya	100	36,9	61,21
23	Menes	100	27,7	N/A
24	Munjul	100	37,2	N/A
25	Pagelarang	91,6	35,6	88,8
26	Pandeglang	100	32,5	43,2
27	Panimbang	100	33,8	100
28	Patia	100	32,1	97,5
29	Picung	75,2	57,1	45,6
30	Pulosari	100	29,0	82,4
31	Saketi	85,9	40,4	34,7
32	Sindangresmi	15,3	60,8	100
33	Sobang	66,0	30,3	89,6
34	Sukaesmi	100	29,4	76,1
35	Sumur	82,7	55,3	N/A

Sumber: Dashboard Cakupan Pelayanan Stunting Kemendagri, 2021

## 2.2. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

### A. Tantangan Aspek Ketersediaan Pangan

Adanya penurunan luas panen dan kekeringan selama tahun 2020 berdampak terhadap penurunan produksi beberapa komoditi pangan termasuk pada hampir semua komoditas tanaman palawija, kecuali tanaman kacang tanah dan ubi jalar yang meningkat jumlah produksinya. Produksi kacang tanah tahun 2020 meningkat 56,72 persen menjadi 447 ton sedangkan produksi ubi jalar meningkat 57,41 persen menjadi 8.848 ton di tahun 2020.

Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan perumahan maupun alih fungsi lainnya. Namun hal tersebut dieliminir dengan kebijakan penetapan LP2B dan LCP2B di RTRW Kab. Pandeglang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031.

### B. Tantangan Aspek Keterjangkauan Pangan

Akses ekonomi terhadap pangan yang menjadi permasalahan adalah rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan. Masalah ini diakibatkan karena ketidakterjaminan pangan atau *food insecurity*, juga dikarenakan kemampuan dalam hal memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan sendiri yang masih rendah masih rendah. Rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2019 untuk konsumsi pangan masih berada pada angka Rp 451.446,00 (mengalami penurunan dari tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi pangan tahun 2018 sebesar Rp 472.443).

Akses fisik terhadap pangan yang mejadi permasalahan adalah kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani.

Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, BPS, di Kabupaten Pandeglang, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Cibitung (Desa Sindangkerta dan Kiarajungkung), Kecamatan Cikeusik (Desa Leuwibalang, Cikadongdong), Kecamatan Sobang (Desa Cimanis, Kertaharja), Kecamatan Picung desa Pasirsedang, Kecamatan Saketi desa Parigi, Kecamatan Patia (desa Turus, Idaman, Rahayu), Kecamatan Sukaresmi (Desa Seuseupan, pasirkadu, Perdana, Sukaresmi, Kubangkampil, Cibungur, Weru, dan Cikuya) dan Kecamatan Cadasari desa Cikentrung. Sementara desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di 2 desa yang terbagi di Kecamatan Cibaliung Desa Curug, dan Kecamatan Cikedal Desa Bangkuyung.

### C. Tantangan Aspek Pemanfaatan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik.

Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk di Banten masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan.

Selain itu, masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kabupaten Pandeglang, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.



BAB III  
RENCANA AKSI MULTISEKTOR

3.1 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pandeglang disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Tabel 7. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi

No	Indikator	Baseline	Target 2024
<i>Intermediate Outcome</i>			
1	Produksi Padi (ton)	795,415.60	140.642,74
2	Ketersediaan Protein Hewani (ton)	271.11	276.56
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	1,01	1,01
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	0,9	1,09
5	Skor Pola Pangan Harapan	72,3	83,90
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	262,8/2000	2100
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	278,6/57,0	58,9
8	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	72,3	83,90
9	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	40,1	50,4
10	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	247,1	215
11	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	80	129
12	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	0,35	35
<i>Outcome</i>			
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	37,8 % (SSGI, 2021)	23,84 %
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	5,8 % (SSGI, 2021)	7 %
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	10,00	10,00

Untuk pencapaian pada indikator *intermediate outcome* dapat dijelaskan pada tabel matriks program dan kegiatan di masing-masing tujuan strategis yang dapat disesuaikan dengan rencana kerja OPD teknis, sementara untuk mendukung pencapaian target pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana tercantum pada Tabel 3, indikator tersebut dapat diacu dan diselaraskan fokus pelaksanaannya di daerah melalui penajaman aksi yang dirumuskan pada RAD-PG sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

### 3.2 Ruang Lingkup Wilayah, Kependudukan dan Substansi

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebesar 2.746,81 km<sup>2</sup> atau sebesar 27.468.100 Ha, yang terbagi ke dalam 35 kecamatan dan 339 desa/kelurahan. Luas Kabupaten Pandeglang mengambil porsi sebesar 28,43% dari luas total Provinsi Banten, hal ini menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten terbesar kedua di Provinsi Banten.

Secara astronomis, Kabupaten Pandeglang berada pada 6°21'00"-7°10'00" Lintang Selatan dan 105°48'00"-106°11'00" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota sekitarnya, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki luas administrasi paling besar kedua setelah Kabupaten Lebak, dengan persentase sebesar 28,43% dari luas Provinsi Banten.

Wilayah yang luas ini sebagian merupakan kontribusi dari pulau-pulau yang berada di Kecamatan Labuan serta Kawasan Tanjung Lesung. Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah pulau-pulau kecil tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, dengan total sebanyak 51 pulau kecil. Kecamatan Labuan sendiri berkontribusi sebanyak 29 pulau kecil dari total pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dalam Angka 2017, Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan Kab/Kota lainnya di Provinsi Banten, yaitu sebesar 307 km, dengan sebagian besar kecamatannya berhadapan dengan laut.

Secara administrasi, Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 326 Desa. Data berdasarkan Kabupaten Pandeglang dalam Angka menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019, tidak terjadi pemekaran sehingga jumlah administrasi kecamatan, kelurahan, dan desa tetap.

Secara topografi, Kabupaten Pandeglang didominasi oleh dataran landai sebesar kurang lebih 85,07% dari luas total kabupaten yang berlokasi pada sekitar pesisir pantai dan bagian tengah kabupaten. Sedangkan, dataran tinggi terkonsentrasi pada bagian utara dan sebagian kecil pada bagian tengah kabupaten, dengan ketinggian wilayah mencapai 257,93 mdpl. Di daerah utara, terdapat gunung-gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (ketinggian 1.778 m), Gunung Pulosari (ketinggian 1.346 m), dan Gunung Aseupan (ketinggian 1.174 m). Jika dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian wilayah paling tinggi.

Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam iklim Af (Iklim Hujan Tropis), dimana dalam klasifikasi ini curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Data curah hujan Kabupaten Pandeglang terbaru pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan terendah atau bulan kering di Kabupaten Pandeglang terjadi pada bulan Juli dan Agustus, di mana pada masing-masing bulan rata-rata curah hujan hanya mencapai 48,1 mm dan 20,1 mm, atau di bawah 100 mm. Sementara rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada bulan Februari, di mana rata-rata curah hujan mencapai 551,9 mm.

Curah hujan rata-rata per bulan di tahun 2017 menunjukkan bahwa bulan Maret hingga Juni, kemudian bulan September hingga Oktober Kabupaten Pandeglang terjadi curah hujan menengah (100-300 mm), kemudian bulan November hingga bulan Februari terjadi curah hujan tinggi (300-500 mm), dan curah hujan rendah (0-100mm) terjadi pada bulan Juli dan Agustus.

Data penggunaan lahan terbaru di Kabupaten Pandeglang yang tersedia ialah data pada tahun 2018. Penggunaan lahan kawasan budidaya dapat dikelompokkan menjadi guna lahan pertanian sawah (21%), guna lahan pertanian bukan sawah (70%), dan guna lahan bukan pertanian (9%). Guna lahan pertanian sawah terbagi ke dalam pertanian sawah irigasi dan tadah hujan, di mana pada tahun 2018 luas pertanian sawah yang menggunakan sumber pengairan melalui tadah hujan (58,5%) masih lebih besar dibandingkan luas pertanian sawah yang sudah menggunakan pengairan dengan irigasi (41,5%).

Guna lahan pertanian bukan sawah paling besar yaitu untuk tegal/kebun sebesar 35%, kedua terbesar ialah untuk hutan rakyat sebesar 22,94% dari luas pertanian bukan sawah. Lahan bukan pertanian termasuk di dalamnya lahan terbuka yang sementara tidak diusahakan, lahan terbangun, dan RTH.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 mencapai 1.272.687 dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 653.411 atau 51,34 persen dan penduduk perempuan sebesar 619.276 atau 48,66 persen. Bila di bandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lainnya se-Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten dengan populasi terkecil ketiga (10, 69 persen) setelah Kota Cilegon (3,65 persen) dan Kota Serang (5,81 persen) dari total jumlah penduduk Banten.

Selama tahun 2010-2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pandeglang mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 5,02 persen. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 463 penduduk per kilometer persegi. Dengan kata lain, untuk setiap satu kilometer persegi wilayah Kabupaten Pandeglang dihuni sekitar 463 penduduk. Sementara itu *sex ratio*-nya sebesar 105,51 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Atau terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Pandeglang sebesar 68,32 persen, sementara itu penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebesar 26,79 persen dan penduduk usia tua (usia 65 tahun ke atas) sebesar 4,89 persen. *Dependency ratio* Kabupaten Pandeglang sebesar 46,37 yang berarti secara rata-rata 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban sebanyak 58 penduduk usia non produktif (usia 0-14

tahun dan usia 65 tahun ke atas). Dilihat berdasarkan distribusi spasial penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2020, Kecamatan Labuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pandeglang, yaitu mencapai 55.980 jiwa, padahal kecamatan tersebut memiliki luas terkecil yaitu sebesar 15,66 km<sup>2</sup>. Sebaliknya Kecamatan Koroncong dengan total penduduk 21.615 jiwa menjadi kecamatan yang paling sedikit penduduknya. Sedangkan Pandeglang yang merupakan Ibukota kabupaten total penduduknya mencapai 43.897 berada di posisi ke tujuh.

Dilihat keterbandingan antara total penduduk dengan luas wilayahnya, daerah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Labuan dengan tingkat kepadatan penduduk 3.574,71 penduduk per km<sup>2</sup>. Sebaliknya Kecamatan Sumur merupakan daerah yang paling jarang penduduknya, yakni 98,64 penduduk per km<sup>2</sup>. Berdasarkan rasio jenis kelamin, seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki *sex ratio* di atas 100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya hampir sama di setiap kecamatan. *Sex ratio* terbesar di Kecamatan Cadasari yaitu sebesar 109,81 sedangkan *sex ratio* terkecil di Kecamatan Sobang yakni sebesar 101,22.

### 3.3 Penguatan RAD-PG

RAD-PG merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMD. Selain itu rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19.

Konsep baru penyusunan RAD-PG 2022-2024:

- a. Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis;
- b. Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB dan RPJMD;
- c. Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor;
- d. Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit;
- e. Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku Surat Edaran Bersama yang sudah selesai, serta kebutuhan

kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Penyusunan Perpres ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

Di Kab. Pandeglang, pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terlihat dari focal poin yang telah dibentuk pemerintah daerah kabupaten Pandeglang sebagai rangkaian untuk mendukung kesetaraan gender.

Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbuan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Kehadiran RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

## BAB IV

### KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

#### 4.1 Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) Integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) Jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) Lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Mengacu kepada RAN-PG, telah dipilih dan ditetapkan Strategi yang dipilih oleh Kabupaten Pandeglang dalam menyusun RAD-PG sesuai dengan kondisi spesifik di daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman, antara lain:
  - a. peningkatan produksi pangan yang beragam;
  - b. penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - c. pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
  - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*).
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman, antara lain:
  - a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
  - c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
  - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
  - e. penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
  - f. penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
  - g. pengembangan sistem logistik pangan.
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
  - a. penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
  - b. pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
  - c. edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
  - d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;

- e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
  - f. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
  - g. peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  - h. pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi antara lain:
- a. peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah;
  - b. penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah
  - c. penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
  - d. penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

#### 4.2 Pengorganisasian

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pandeglang akan diselenggarakan oleh forum koordinasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 030.05/Kep.359-Huk/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024 yang menetapkan Keanggotaan Forum Pengarah dan Forum Teknis RAD-PG Kabupaten Pandeglang beserta tugas, fungsi dan kewenangannya.

Adapun susunan forum pengarah RAD-PG di Kabupaten Pandeglang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pandeglang No. 030.05/Kep.359-Huk/2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

#### 4.3 Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti perguruan tinggi dan mitra pembangunan/CSO maupun forum CSR terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;

4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD-PG.

#### 4.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah hal yang penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besaran dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD, Renstra OPD, serta rencana pendanaan sumber lain.

Kegiatan-kegiatan dalam matriks RAD-PG yang direncanakan akan menggunakan Pembiayaan yang menggunakan RPJMD melalui sistem SIPD akan diupayakan telah sinkron dengan menu yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah.



## BAB V

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan cara:

##### 1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten

###### a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- 1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- 2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/*skoring* terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

###### b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

###### c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG.

###### d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

##### 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

###### a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;

- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan; dan
  - 4) Hasil *Workshop* : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.
- b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
  - 2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Form kunjungan lapangan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
  - 3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

## 5.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Pandeglang akan disampaikan oleh bupati kepada Gubernur Banten. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Adapun tujuan pelaporan RAD-PG antara lain adalah:

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di daerah;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dan potensi praktik baik;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi ini sebagai berikut:

1. RAD-PG diharapkan mampu menjadi operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs dan juga diselaraskan dengan RPJMD.
2. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.
3. RAD-PG merupakan terjemahan dari RAN-PG 2021-2024 serta sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya di Pusat dan Daerah yang Pemanfaatannya tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah.
4. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/ *mid-term* dan akhir periode.

#### 6.2 Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu berkomitmen dalam menjadikan RAD-PG sebagai instrumen daerah di bidang pangan & gizi serta memastikan dokumen perencanaan daerah selaras dengan indikator dan target pembangunan bidang pangan & gizi di pusat.
2. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan RAD-PG tidak hanya bersifat administratif, namun juga bersifat penguatan & diimplementasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Lampiran 1. Matriks Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
<b>KETERSEDIAAN</b>													
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Terbentuknya sentra produksi pangan lokal	1 Lokasi	1 Lokasi	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Pembangunan jalan produksi	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPD	
			Terbentuknya sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani	10 Lokasi	10 Lokasi			2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Penyediaan lantai jemur	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPD	pemanfaatan pelaku forum umkm
			Terbentuknya sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	10 Lokasi	10 Lokasi			3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Pembentukan sentra produksi	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH		
				2023	2024										
								4	KoorDinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Monitoring Lembaga Usaha Pemberdayaan Masyarakat	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPD		
								5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Pembuatan Roadmap kemandirian pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPD		
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan dan Penyediaan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPD	
								2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi, kerbau	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan		

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
												perdagangan, DPMPD	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal	Persentasi kenaikan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal	34%	34.01%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Pengembangan Bibit dan Ternak	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas perikanan, Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas kesehatan	
								2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Buffer Stock, Penangkaran dan Pengadaan bibit dan ternak	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	
								3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Bibit bakalan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan. Dinas kesehatan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
							2 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Penyediaan benih/bibit bahan pakan ternak	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	
							3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan sapsras budidaya	Dinas perikanan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Pengadaan sarana dan Prasarana alat tangkap ikan	Dinas perikanan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	
			Terpenuhi gizi keluarga yang sehat dan beragam	10 Lokasi	10 Lokasi	PROGRAM BUDI KASAMBER (BUDI DAYA IKAN DAN SAYURAN DALAM EMBER)	Pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui gerakan tanam di lokus stunting				tim pkk	DPMPD, Dinas perikanan	forum csr
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta	Persentasi desa fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan baik melalui	20%	80%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Analisis NBM	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas perikanan, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan	forum csr



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
		jaminan keamanan dan mutu pangan	P2L dan program daerah.				Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
								2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Survey Harga pasar	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas perikanan, Dinas koperasi, umkm,	
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan bagi pemenuhan konsumsi pangan keluarga yang B2SA di desa lokus penurunan <i>stunting</i> dan <i>urban farming</i> .	2 Kelompok	8 Kelompok	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan KWT	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	perindustrian dan perdagangan, Dinas kesehatan, Bagian Perekonomian SETDA	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penyusunan Dokumen	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas pertanian dan ketahanan pangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
							2 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penyusunan Dokumen	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
			Jumlah desa pangan aman yang dibina				3 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Penyusunan Dokumen	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
								Jajanan	Makanan Jajanan				
			Terbentuknya kerjasama OKKPD dengan BPOM untuk keamanan pangan segar				4 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Penyusunan Laporan	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan					2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Penyusunan Dokumen	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, DPMPSTP	
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	Sosialisasi	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH		
				2023	2024										
								2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Dokumen	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan		
								3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan		
								4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan		
			Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman	Penyusunan laporan pengawasan /Monev	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
							Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kecil	Skala Kecil				
								2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kab/Kota	Jumlah Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan Sarana IB	Pengadaan Sarana IB	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	
								3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Monev Pengawasan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Terbentuknya Tim KoorDinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki program Pengawasan Keamanan	1 Tim Koor Dinasi	1 Tim Koor Dinasi	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Penerbitan Sertifikat Produksi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
			Pangan Daerah di retailer dan pasar tradisional				Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	SPPIRT			
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan Sarana IRTP, Pengawasan Kualitas Produk IRTP dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	Dinas kesehatan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan	Persentase kenaikan cadangan pangan	60%	60%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIK	1 Pengelolaan dan Keseimbangan	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Penyusunan laporan CPP	Dinas pertanian dan ketahanan	setda kabupaten pandeglang	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
	pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat		pemerintah daerah			ASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		pangan		
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Persentasi Kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	35%	65%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Laporan CPP	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	3 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Pemeliharaan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai	1 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Monev	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH		
				2023	2024										
							dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
								2	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Sosialisasi	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	DPMPD		
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan smart farming untuk mencegah food loss			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bimbingan Teknis/ Workshop	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	DPMPD	usaid-erat, tanoto foundation
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan peningkatan			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	Bimbingan Teknis/ Workshop	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	DPMPD	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
	GKAUAN												
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan	Terselenggaranya gelar pangan murah/ bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan/atau Rumah Pangan Kita Bulog	4 Kali	10 Kali	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Peyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kominfo	
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Peyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/ Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Jumlah UMKM/ Koperasi/ BUMDes sektor pangan yang dibangun untuk meningkatkan produk berbahan dasar pangan lokal untuk peningkatan gizi kelompok rawan	150 UMKM	150 UMKM	PEMBER DAYAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	1 Penberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koorDinasi dengan para pemangku kepentingan	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku UMKM	Pelatihan Kewirausahaan Vokasional Berupa Pengembangan Usaha berdasarkan potensi lokal daerah	Kelompok Tani	Dinas kesehatan	keterlibatan csr
2.4	Pengembangan sistem jaringan pangan sosial dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Persentase e-warong yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	100 %	100 %	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/ Kota	1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya ekonomi keluarga penerima bantuan sosial	Sosialisasi, Monitoring & Rapat Evaluasi penerima bantuan sosial (BPNT)	Dinas sosial	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, DPMPD	
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/ mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	5 Ton	5 Ton	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada	Penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, DPMPD	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
		(CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing							Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan				
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/Kota	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Bintek Kerawanan Pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, DPMPD
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis	Pembinaan KWT	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, DPMPD

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
							gizi		Sumber Daya Lokal				
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasar kan kondisi daerah				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Penyusunan Peta Distribusi Logistik Komoditas Bahan Pokok	JUmlah dokumen Peta Distribusi Logistik Komoditas Bahan Pokok	Penyusunan Dokumen	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
							2 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan KoorDinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
							3 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	
3	PEMANFAATAN												
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Tersedianya portal Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Penyusunan Dokumen	Dinas kesehatan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	
			Tersedianya data skor PPH Konsumsi Pangan	83%	86%			2 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan Dokumen	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yg mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1 Penyusunan Peta Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen hasil koorDinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	Penyusunan dokumen Analisi Peta Kerawanan Pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	DPMPD	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
			kebijakan ketahanan pangan											
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan	
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/ pangan lokal" di wilayah kabupaten/ kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/ pangan lokal" di wilayah kabupaten/ kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	1 Kegiatan	2 Kegiatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gerakan Aksi Bergizi Selasa Berseri Tanpa Anemia (SARITA SANTIK)	Dinas kesehatan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, dis komsantik	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Melakukan penguatan kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	Terlaksananya kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	2 Kegiatan	10 Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembagian hasil olahan ikan, penyuluhan tentang pentingnya konsumsi ikan, lomba cipta menu berbahan dasar ikan	Dinas perikanan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tim Penurunan Stunting	Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting	DP2KBP 3A	Dinas kesehatan, Bappeda	tanoto foundation dan yayasan cipta

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH		
				2023	2024										
		Peningkatan kapasitas pemda dalam implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku PPS yang berbasis pada tokoh kunci	Meningkatnya kapasitas pelaksana PPS tingkat kabupaten/ kota	35 Kecamatan	35 Kecamatan	PROGRAM MITRA					tanoto foundation dan yayasan cipta	Bappeda	tanoto foundation dan yayasan cipta		
				36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kader Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting	Dinas kesehatan	DPMPD	
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan yang dilibatkan dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat,	35 Kecamatan	35 Kecamatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia 15-59 Tahun	Skrining Faktor Risiko PTM pada Masyarakat	Dinas kesehatan	DP2KBP 3A	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
			aktivitas fisik dan deteksi dini										
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Gerakan sadar konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbng dan Aman (B2SA) di Daerah Stunting di Kab/Kota	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, Bappeda	
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah lokasi kampanye langsung atau digital yang dilakukan influencer/ tokoh masyarakat/ agama/ politik lokal untuk perubahan perilaku makan B2SA	0	1 Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan, Bappeda	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah tim penggerak PKK di desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas/pendampingan perempuan (untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak)	36 Tim Penggerak PKK	36 Tim Penggerak PKK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pokjanal Posyandu, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, Forum Kader Kabupaten	Pertemuan koorDinasi, sosialisasi dalam rangka meningkatkan dukungan mitra penggerakkan masyarakat dan pelaksanaan posyandu	Dinas kesehatan	DP2KBP 3A, DPMPD,	
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	0	5 Sekolah	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	Penyusunan Laporan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Dinas kesehatan; Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Tersedianya konsep isi piringku dengan pangan lokal di Kab. Pandeglang	1 Konsep	1 Konsep	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gerakan Aksi Bergizi Selasa Berseri Tanpa Anemia (SARITA SANTIK)	Dinas kesehatan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan; Dinas perikanan	
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu	Membina kabupaten/ kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP-ASI	Tersedianya /ditetapkannya regulasi mengenai ASI Eksklusif	1 Per bub	1 Per bub	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersusunnya Perbup	Penyusunan Draft Perbup	Dinas kesehatan	SETDA	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
	(MP-ASI) berbasis pangan lokal;												
			Jumlah balita kekurangan gizi yang mendapatkan MP-ASI berbahan dasar pangan lokal	100 %	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
			Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT berbahan dasar pangan lokal	100 %	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan	Tersedianya komitmen pencapaian cakupan target sasaran suplementasi gizi sebesar 90 % pada tahun 2024	1 komitmen	1 komitmen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tenaga Pelaksana Gizi (TPG)	Rapat Koordinasi Program Gizi	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024										
		tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024													
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat pemberian bubuk tabur gizi	100 %	100 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penyusunan dokumen	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam tata kelola pelayanan gizi bagi kelompok rawan dalam situasi pandemi	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Gizi	Bintek pada Puskesmas Terkait Surveilans Gizi dan intervensi Gizi	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang datang ke puskesmas/ FKTP untuk kunjungan sakit maupun sehat	Deteksi dini faktor risiko PTM, monitoring, melakukan pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana, melakukan rujukan kasus dan menerima rujuk balik	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Jumlah puskesmas yang aktif melakukan kampanye Gerakan Lawan Obesitas (GENTAS)	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk usia 15 Tahun ke atas	Posbindu PTM	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos	Jumlah puskesmas melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	358 posbindu PTM	Posbindu PTM	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
4.1	Penguatan koorDinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koorDinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koorDinasi percepatan penurunan stunting	Tersedianya forum untuk koorDinasi pembangunan dan gizi lintas sektor	1 Tim Forum KoorDi RAD PG	1 Tim Forum KoorDi RAD PG	KoorDinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 KoorDinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	1 KoorDinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Perbup RAD-PG	Penyusunan Dokumen RAD PG Kabupaten Pandeglang 2022-2024 Penetapan Perbup, Sosialisasi Perbup RAD-PG, Pemantauan dan Evaluasi	Bappeda	semua pd yang terlibat dalam forum RAD-PG	
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah)			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga	Penyusunan Dokumen	Bappeda	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas kesehatan	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
									Kerja				
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.	Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku dalam mencegah <i>food waste</i> dan <i>food loss</i>		1	PROGRAM PENGELO LAAN PERSAMPA HAN	1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Sosialisasi	Dinas lingkungan hidup	Bappeda, Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas koperasi, umkm, perindustrian dan perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					2	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA DESA DAN KELURAHAN	1 KoorDinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Penyusunan Dokumen	DPMPD	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas lingkungan hidup	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH		
				2023	2024										
								2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Penyusunan Laporan	DPMPD	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas lingkungan hidup		
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah OPD bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya	64 OPD	64 OPD	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	64 Perangkat Daerah	Rapat KoorDinasi Pelaksanaan Pengarustamaan Geder, Input data GAP/GBS	DP2KBP3A	semua opd	
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat	36 Organisasi	36 Organisasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	eningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga KewenanganKaupaten/Kota	2 Desa	Pembinaan P2WKSS	DP2KBP3A	semua badan/ Dinas	

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANG GUNG JAWAB	OPD PENDUK UNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
			untuk mengendalikan obesitas dan PTM										
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Tersedianya regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	1 Draft	1 Regulasi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasara	1 Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/ LP2D, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	sosialisasi	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Bappeda	

Lampiran 2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA/KELUARAN RAD-PG TAHUN .....

Strategi	Aksi/ Kegiatan	Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian <i>Output</i>		Anggaran (Juta Rupiah)		Sumber Pendanaan	Kegiatan <i>Stunting</i> (Ya/Tidak)
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>									
<b>TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>									
<b>TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>									
<b>TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>									

Catatan: Format ini sudah disesuaikan dengan Lembar Kerja #14 Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota (8 Aksi Intergrasi Intervensi Penurunan *Stunting*).

Lampiran 3. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

FORM PEMANTAUAN B. PROSES PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN .....

Indikator Proses	Skor* Tahun Penilaian	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Melibatkan Pemangku Kepentingan Untuk Beraksi Bersama			
2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Koheren			
3. Memastikan Kegiatan Terlaksana Untuk Mencapai Hasil yang Telah Disetujui Bersama			
4. Memantau Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya			
5. Indikator Tambahan Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota -Pemanfaatan RAD-PG dalam Pelaksanaan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i>			

\*) Skor Mengikuti Skala Penilaian Berikut

0	Belum dilakukan	Tidak dilakukan saat ini
1	Dilakukan	Prosesnya kurang berjalan dengan baik
2	Dilakukan	Prosesnya berjalan cukup baik
3	Dilakukan	Prosesnya berjalan sangat baik

Catatan: Penjelasan mengenai indikator proses di atas dapat dilihat pada narasi pada sub bab 4.1.2

Untuk pemberian skor tertinggi (Nilai 3), Forum Teknis RAD-PG harus mampu melampirkan bukti pada masing-masing penanda kemajuan sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab V. Pemantauan dan Evaluasi



Lampiran 4. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

FORM PEMANTAUAN C. UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN .....

Strategi	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
TS 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 2 : Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
TS 3 : Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
TS 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		



## CARA PENGISIAN FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI:

1. FORM PEMANTAUAN A: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN BERJALAN
  - a. Kolom 1 diisi dengan strategi rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan aksi penjabaran strategi untuk pencapaian tujuan RPJMN/RPJMD
  - c. Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan aksi
  - d. Kolom 4 diisi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
  - e. Kolom 5 diisi dengan besar capaian *output* yang ditargetkan sesuai dengan tahun pelaporan.
  - f. Kolom 6 diisi dengan realisasi *output* sesuai dengan tahun pelaporan.
  - g. Kolom 7 diisi dengan besar anggaran definitif yang dialokasikan untuk aksi.
  - h. Kolom 8 diisi dengan besar anggaran yang diserap untuk aksi.
  - i. Kolom 9 diisi dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk aksi
  - j. Kolom 10 diisi dengan YA jika merupakan kegiatan konvergensi penurunan *stunting*, dan TIDAK jika bukan merupakan kegiatan penurunan *stunting*.
  
2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI B: PROSES PELAKSANAAN RAD-PG UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DAERAH
  - a. Kolom 1 diisi dengan indikator proses yang akan dievaluasi
  - b. Kolom 2 diisi dengan skor penanda kemajuan tahun berjalan yang dinilai. Pemberian nilai sesuai dengan skala penilaian angka 0 (terendah) hingga 3 (tertinggi).
  - c. Kolom 3 diisi dengan deskripsi masalah atau tantangan yang ditemui pada masing-masing penanda kemajuan.
  - d. Kolom 4 diisi dengan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi tantangan dan pencapaian skor proses yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya.
  
3. FORM PEMANTAUAN C: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG
  - a. Kolom 1 diisi dengan tujuan strategis rencana aksi pangan dan gizi
  - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi A dan B.  
Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke OPD mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
  - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

4. FORM PEMANTAUAN D: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurutan untuk mendeskripsikan banyaknya OPD beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
- a. Kolom 2 diisi dengan OPD yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
- b. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.
- c. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- d. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- e. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- f. Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6.

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA